



PUTUSAN
NOMOR: 59-K/PM II-08/AL/III/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama : Eko Ayik Purwahyudi
Pangkat / NRP : Kopda Mar/86186
Jabatan : Ta Brigif-2 Mar
Kesatuan : Brigif-2 Marinir
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 05 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Citra Graha Prima Rt.03 Rw.05 Kel. Singasari Kec. Jonggol Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 4 November 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif-6 Marinir selaku Ankum Nomor Kep/27/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 4 November 2008 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-2 Marinir selaku Papera Nomor. Kep/42/XI/2008 tanggal 6 November 2008.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas.

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Lantamal BPP/110/B-4/XI/2008 bulan November 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif-2 Mar selaku Papera Nomor: Kep/01/1/2008 tanggal 22 Januari 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Dak/371 /li/2009 bulan 16 Februari 2009.
3. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :
 - a. Tap-21/K/PM II-08/AL/11/2010 tanggal 2 Februari 2010.
 - b. Tap-56/K/PM II-08/AL/III/2010 tanggal 2 Maret 2010.

Mendengar, keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 2 (dua) kali sejak bulan Februari 2010 akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuannya.

Menimbang :

1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 2 (dua) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 2 Februari 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
2. Sidang kedua pada tanggal 2 Maret 2010, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan (berikutnya). Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat di hadapkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat di hadapkan di persidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, Bahwa apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat di temukan kembali maka perkara ini dapat di proses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan :

- a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, Eko Ayik Purwahyudi Pangkat: Kopda Mar NRP.86186 tidak dapat diterima.
- b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor CHK NRP. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.Rizal, SH Kapten Chk NRP.11010024160477, Panitera Gusti Tarigan, BCHK Peltu NRP.565313, di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor CHK NRP. 1930004780966
CHK NRP.563660

TTD

Kirto, SH
Mayor

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Gusti Tarigan, BcHK
Peltu NRP.565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)